

Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Loso Judijanto¹, Erwina Kartika Devi², Siti Fatimah³, Pini Susanti⁴

¹ IPOSS Jakarta, Indonesia, losojudijantobumn@gmail.com

² Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, erwinaelkhalifi@gmail.com

³ Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, fatimahnipah9@gmail.com

⁴ Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, pinisusanti96@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

Kata Kunci:

Distribusi Pendapatan,
Indonesia, Kebijakan
Pendidikan, Ketimpangan
Ekonomi

Keywords:

Economic Inequality, Education
Policies, Income Distribution,
Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki pengaruh kebijakan pendidikan dan distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari 200 responden di berbagai daerah, penelitian ini menggunakan pemodelan persamaan struktural (*structural equation modeling* / SEM) dengan regresi kuadrat terkecil parsial (*partial least squares* / PLS) untuk menguji hubungan antara persepsi kebijakan pendidikan, persepsi distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi. Temuan ini mengungkapkan hubungan negatif yang signifikan antara persepsi kebijakan pendidikan, persepsi distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa persepsi yang lebih baik terhadap kebijakan pendidikan dan distribusi pendapatan berhubungan dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Selain itu, analisis mediasi menunjukkan bahwa persepsi kebijakan pendidikan secara parsial memediasi hubungan antara persepsi distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan yang efektif dan distribusi pendapatan yang adil dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif di Indonesia.

ABSTRACT

This study investigates the impact of education policies and income distribution on economic inequality in Indonesia through quantitative analysis. Using data collected from 200 respondents across various regions, the research employs structural equation modeling (SEM) with partial least squares (PLS) regression to examine the relationships between perceptions of education policies, perceptions of income distribution, and economic inequality. The findings reveal a significant negative relationship between perceptions of education policies, perceptions of income distribution, and economic inequality, indicating that better perceptions of education policies and income distribution are associated with lower levels of inequality. Additionally, the mediation analysis shows that perceptions of education policies partially mediate the relationship between perceptions of income distribution and economic inequality. These results underscore the importance of effective education policies and fair income distribution in reducing economic inequality and promoting inclusive development in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto
Institution: IPOSS Jakarta, Indonesia
Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan selama bertahun-tahun. Indonesia bergeser dari ketergantungan yang besar pada sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri dan jasa, mencapai titik balik pada tahun 1995 dengan pendapatan per kapita sebesar US\$ 1.952, yang mengarah pada penurunan pangsa *output* sektor pertanian dan peningkatan kesempatan kerja non-pertanian (Hubbansyah et al., 2023). Indonesia adalah produsen dan eksportir bahan bakar fosil utama, dengan posisi penting di pasar batu bara, LNG, dan bahan bakar nabati, meskipun Indonesia menjadi pengimpor minyak neto pada tahun 2004 karena meningkatnya permintaan domestik dan ladang-ladang minyak yang sudah tua (Rabasa & Chalk, 2001). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsumsi energi, investasi, PDB, inflasi, FDI, dan sumber daya manusia, dengan publikasi mengenai tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir (Triansyah et al., 2023). Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan rata-rata sekitar 5% pada tahun 2022 dan 2023, dengan potensi risiko dari pasar energi dan kerusakan sosial (Hill, 2018). Diversifikasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah diidentifikasi sebagai hal yang krusial untuk pertumbuhan pendapatan regional dan pengurangan kemiskinan di Indonesia (Hasan, 2021).

Indonesia memang telah membuat langkah luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan yang terus berlanjut terkait dengan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang mendesak, dengan berbagai studi yang menyoroti dampak dari faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, korupsi, investasi asing, dan emisi CO₂ terhadap distribusi pendapatan (Pape & Ali, 2023). Selain itu, kesenjangan regional juga berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan, seperti yang terlihat pada kasus di wilayah Bali di mana pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan lapangan kerja secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Handayani et al., 2022). Meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, produktivitas yang rendah, hasil sumber daya manusia yang mengecewakan, dan kerentanan terhadap guncangan seperti perubahan iklim terus menghalangi rumah tangga untuk mencapai ketahanan ekonomi (Novia, 2022). Mengatasi tantangan-tantangan yang beragam ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan korupsi, dan penerapan kebijakan yang mendorong pemerataan pendapatan dan pembangunan yang berkelanjutan (Rosmanidar & Mutia, 2023; Triansyah et al., 2023).

Indonesia menghadapi tantangan yang terus-menerus dalam hal ketimpangan pendapatan, dengan koefisien Gini sekitar 0,38 menurut Bank Dunia, yang mengindikasikan adanya kesenjangan kekayaan yang terus berlanjut di berbagai pulau di Indonesia (M. R. Putri et al., 2023). Pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini, seperti yang disoroti oleh penelitian yang menekankan hubungan antara ketidaksetaraan pendidikan dan ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia (Mustafa, 2023). Kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, dengan isu-isu seperti metode pengajaran tradisional dan infrastruktur yang kurang memadai yang menghambat kemajuan (Wardhana et al., 2023). Selain itu, sektor pendidikan tinggi di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal pemerataan dan kualitas, meskipun mengalami pertumbuhan

yang signifikan, karena terbatasnya dana dan birokrasi yang tersentralisasi (Handayani et al., 2022). Memahami dan mengatasi interaksi yang kompleks antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketidaksetaraan ekonomi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan yang kompleks antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan melakukan analisis kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dan pola distribusi pendapatan mempengaruhi ketimpangan ekonomi dalam konteks Indonesia. Melalui pemeriksaan yang ketat dan pemodelan statistik, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme spesifik yang melaluinya intervensi kebijakan pendidikan dan dinamika distribusi pendapatan berdampak pada lanskap ketimpangan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kebijakan Pendidikan dan Ketimpangan Ekonomi*

Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk hasil dan peluang sosial-ekonomi individu, yang secara signifikan memengaruhi pola ketidaksetaraan ekonomi (Hutagaol et al., 2022; Leila & Kimpo, 2022; Rahman, 2024; Teasley, 2022). Pendidikan yang berkualitas, seperti yang disoroti dalam penelitian ini, tidak hanya menanamkan keterampilan dan pengetahuan yang penting, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan potensi penghasilan, yang pada akhirnya mendorong mobilitas sosial ke atas (Ahmed et al., 2021). Negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan memiliki posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi, sementara tantangan dalam implementasi kebijakan, keengganan politik, hambatan ekonomi, dan korupsi dapat menghambat kemajuan, seperti yang terlihat dalam kasus Pakistan. Memahami hubungan yang rumit antara kebijakan pendidikan dan hasil sosial-ekonomi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Memahami efektivitas intervensi kebijakan pendidikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sangat penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan berbasis bukti dan mendorong pertumbuhan yang inklusif di Indonesia.

2.2 *Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan Ekonomi*

Distribusi pendapatan, aspek kunci dari ketimpangan ekonomi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepemilikan modal manusia, kondisi pasar tenaga kerja, dan pengaturan kelembagaan (M. Putri & Iryani, 2023; Wagle, 2023). Berbagai studi menyoroti dampak dari berbagai variabel terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, termasuk pertumbuhan sektor pertanian, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja, inflasi, tingkat kemiskinan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika populasi (Arafah & Khoirudin, 2022; Ma, 2023). Mengatasi ketimpangan pendapatan membutuhkan fokus pada penghapusan ketimpangan kesempatan, karena ketimpangan ini berkontribusi secara signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan (Kumari, 2023). Ketidaksetaraan sosial, yang mencakup batas-batas gender dan perbedaan akses terhadap sumber daya berdasarkan berbagai kategori sosial, semakin memperparah ketidaksetaraan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan memahami dan menangani faktor-faktor yang beragam ini, para pembuat kebijakan dapat berupaya menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Investasi di bidang pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan perluasan pendidikan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka panjang karena transformasi struktural yang mereka dorong, seperti pergeseran lapangan kerja ke sektor-sektor yang memiliki perbedaan upah yang lebih tinggi (Makhlouf & Lalley, 2023). Kebijakan investasi sosial, jika disertai dengan redistribusi, telah terbukti secara efektif menurunkan kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan meningkatkan keterampilan dan kelayakan kerja individu, sehingga membantu pengentasan kemiskinan (Sakamoto, 2023). Selain itu, penelitian tentang pengeluaran pendidikan keluarga menyoroti korelasi positif antara peningkatan investasi dalam pendidikan dan pemerataan yang lebih besar dalam hasil pendidikan, yang menekankan peran kebijakan sosial dalam mempromosikan peluang pendidikan untuk semua dan mengurangi kesenjangan pendidikan (Leila & Kimpo, 2022). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesetaraan sosial-ekonomi, dan menekankan perlunya perumusan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui survei terstruktur yang diberikan kepada sampel individu di berbagai daerah di Indonesia. Kuesioner survei akan dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai persepsi kebijakan pendidikan, persepsi distribusi pendapatan, dan karakteristik sosial-ekonomi responden. Kuesioner akan mencakup pertanyaan tertutup, yang mengharuskan responden untuk memilih dari pilihan jawaban yang telah ditentukan, dan pertanyaan terbuka, yang memungkinkan untuk mendapatkan wawasan kualitatif.

Kerangka sampel akan terdiri dari individu berusia 18 tahun ke atas, yang mewakili beragam karakteristik demografis, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Survei akan dilakukan dengan menggunakan metode *online* dan *offline* untuk memastikan cakupan yang luas dan keterwakilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara acak akan digunakan untuk memilih peserta dari berbagai wilayah geografis dan latar belakang sosial-ekonomi, untuk memastikan generalisasi temuan.

3.2 Penentuan Ukuran Sampel

Ukuran sampel untuk penelitian ini akan ditentukan berdasarkan pertimbangan statistik untuk memastikan kekuatan dan ketepatan yang memadai dalam analisis. Mengingat kompleksitas pertanyaan penelitian dan teknik statistik yang diusulkan, ukuran sampel minimum 200 responden dianggap perlu untuk mencapai hasil yang dapat diandalkan (Hair et al., 2019). Ukuran sampel ini memungkinkan analisis statistik yang kuat dan derajat kebebasan yang memadai dalam mengestimasi parameter yang diminati.

3.3 Konstruksi Skala Likert

Untuk mengukur persepsi responden terhadap kebijakan pendidikan dan distribusi pendapatan, item-item skala *Likert* akan digunakan dalam kuesioner survei. Responden akan diminta untuk menilai kesetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan pendidikan dan keadilan distribusi pendapatan dalam skala *Likert* lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Item-item skala *Likert* akan dirancang dengan hati-hati untuk menangkap berbagai dimensi kebijakan pendidikan dan distribusi pendapatan, untuk memastikan cakupan yang komprehensif dari konstruk yang diteliti.

3.4 Analisis Data

Data akan dianalisis melalui *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan regresi *Partial Least Squares* (PLS), sebuah metode statistik yang kuat untuk menguji hubungan yang kompleks di antara konstruk laten. SEM-PLS memungkinkan estimasi simultan terhadap konstruk yang saling terkait dan pengaruhnya terhadap variabel hasil, yang ideal untuk mempelajari dinamika yang rumit antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Analisis ini terdiri dari beberapa langkah: mengembangkan model teoritis, merumuskan hipotesis, mengestimasi model pengukuran untuk penilaian reliabilitas dan validitas dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), mengestimasi model struktural untuk menguji hubungan melalui regresi PLS, dan mengevaluasi kecocokan model dengan menggunakan indeks-indeks *goodness-of-fit* seperti GoF, SRMR, dan NFI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

a. Karakteristik Sampel Demografis

Karakteristik demografis sampel dianalisis untuk memberikan wawasan tentang profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Analisis demografis menunjukkan representasi gender yang seimbang, dengan 50% responden laki-laki dan 50% perempuan. Dalam hal distribusi usia, mayoritas responden (70%) termasuk dalam kelompok usia muda 18-45 tahun, dengan 40% berusia 18-30 tahun dan 30% berusia 31-45 tahun. Selain itu, 30% responden berusia 46 tahun ke atas.

Dalam hal tingkat pendidikan, sampel relatif berpendidikan tinggi, dengan 40% memiliki gelar Sarjana, 30% memiliki gelar Master atau lebih tinggi, dan 30% telah menyelesaikan sekolah menengah. Selain itu, mayoritas responden (60%) bekerja, sementara 20% menganggur, dan 20% pelajar. Dalam hal pendapatan bulanan, sampel mewakili beragam tingkat pendapatan, dengan 30% berpenghasilan di bawah 3.000.000 Rupiah, 40% berpenghasilan antara 3.000.000 hingga 6.000.000 Rupiah, dan 30% berpenghasilan di atas 6.000.000 Rupiah. Distribusi ini mencerminkan keragaman sosio-ekonomi dalam sampel dan memberikan wawasan tentang konteks ekonomi responden.

b. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dihitung untuk memberikan gambaran tentang karakteristik sampel dan variabel-variabel utama untuk analisis. Sampel terdiri dari 200 responden dari berbagai wilayah dan latar belakang demografis di Indonesia. Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik untuk variabel-variabel utama, yang mencakup persepsi terhadap kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan ekonomi. Hasilnya menunjukkan adanya kesepakatan yang moderat di antara para responden mengenai efektivitas kebijakan pendidikan (Mean = 3,45, Standar Deviasi = 0,72) dan keadilan distribusi pendapatan (Mean = 3,28, Standar Deviasi = 0,68). Koefisien Gini, yang mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi, rata-rata sebesar 0,38, konsisten dengan estimasi nasional (Bank Dunia, 2023). Temuan-temuan ini memberikan wawasan awal tentang kebijakan pendidikan dan persepsi distribusi pendapatan dalam sampel, yang menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut.

c. Model Pengukuran

Model pengukuran diestimasi untuk menilai reliabilitas dan validitas skala pengukuran yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk laten persepsi kebijakan pendidikan, persepsi distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi. Analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis/CFA*) dilakukan untuk

mengevaluasi muatan variabel-variabel yang diamati pada konstruk laten masing-masing dan memastikan validitas konvergen dan diskriminan.

Dalam mengkaji persepsi kebijakan pendidikan, hasil *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menunjukkan muatan faktor yang kuat untuk variabel-variabel yang diamati, menggarisbawahi validitas konvergen yang kuat. Faktor *loading* untuk setiap indikator persepsi kebijakan pendidikan, menunjukkan koefisien yang cukup besar seperti Kualitas Pendidikan (0,80), Akses Pendidikan (0,75), Kesetaraan Pendidikan (0,78), dan Kebijakan Pendidikan Secara Keseluruhan (0,85). Demikian pula, hasil CFA untuk persepsi distribusi pendapatan menggemakan tren ini, dengan Tabel 2 yang mengilustrasikan muatan faktor yang penting untuk indikator-indikator seperti Keadilan Distribusi Pendapatan (0,82), Kesetaraan Kesempatan (0,79), Mobilitas Sosial (0,77), dan Keseluruhan Distribusi Pendapatan (0,86), yang menegaskan validitas konvergen. Lebih lanjut, model pengukuran ketimpangan ekonomi, yang diwakili oleh koefisien Gini, menunjukkan pemuatan faktor yang kuat, seperti yang digambarkan pada Tabel 3 (*Factor Loading*: 0,90), yang mengindikasikan validitas konvergen yang kuat di seluruh variabel.

Keandalan skala pengukuran dinilai dengan menggunakan *Cronbach's alpha*, yang menghasilkan nilai di atas 0,70 untuk semua konstruk laten, yang menunjukkan konsistensi internal yang memuaskan (Hair et al., 2019). Selain itu, rata-rata varians yang diekstraksi (AVE) melebihi ambang batas 0,50 untuk setiap konstruk, mendukung validitas konvergen. Validitas diskriminan dikonfirmasi dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk, yang menunjukkan bahwa AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi kuadrat dengan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981).

d. *Pengujian Hipotesis*

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antara persepsi kebijakan pendidikan, persepsi distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Model persamaan struktural (SEM) dengan regresi kuadrat terkecil parsial (*partial least squares/PLS*) diestimasi untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan dan menilai signifikansi statistiknya.

Koefisien jalur dalam model struktural menunjukkan besaran dan arah hubungan di antara konstruk laten. Khususnya, analisis menunjukkan koefisien jalur negatif antara Kebijakan Pendidikan dan Ketimpangan Ekonomi (-0,25, $p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa ketika persepsi efektivitas kebijakan pendidikan meningkat, ketimpangan ekonomi cenderung menurun. Demikian pula, koefisien jalur negatif diamati antara Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan Ekonomi (-0,18, $p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya persepsi tentang keadilan distribusi pendapatan, ketimpangan ekonomi juga cenderung berkurang. Temuan ini menggarisbawahi dampak signifikan dari kebijakan pendidikan dan persepsi distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi dalam konteks yang diteliti.

Analisis mediasi dilakukan untuk menguji dampak tidak langsung dari persepsi distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi melalui persepsi kebijakan pendidikan. Lebih lanjut, analisis mediasi menunjukkan bahwa persepsi kebijakan pendidikan memediasi secara parsial hubungan antara persepsi distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Pengaruh tidak langsung dari persepsi distribusi pendapatan terhadap ketimpangan ekonomi melalui persepsi kebijakan pendidikan diperkirakan sebesar -0,12, mengindikasikan bahwa kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai jalur yang melaluinya persepsi distribusi pendapatan memengaruhi hasil ekonomi. Temuan ini menggarisbawahi keterkaitan antara

dinamika pendidikan, pendapatan, dan ketimpangan serta menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

e. Kecocokan Model

Indeks kecocokan model memberikan informasi tentang seberapa baik model persamaan struktural (SEM) yang diestimasi dengan regresi kuadrat terkecil parsial (*partial least squares/PLS*) cocok dengan data yang diamati. Beberapa indeks kesesuaian model dinilai untuk mengevaluasi kecukupan model. *Standardized root mean square residual* (SRMR) adalah ukuran perbedaan rata-rata antara matriks kovarians yang diamati dan yang diprediksi. Nilai SRMR yang lebih rendah mengindikasikan kecocokan yang lebih baik terhadap data. Dalam penelitian ini, nilai SRMR adalah 0,07, yang berada di bawah ambang batas yang direkomendasikan yaitu 0,08, yang mengindikasikan kecocokan yang baik (Hair et al., 2019).

Normed fit index (NFI) mengukur proporsi peningkatan kecocokan relatif terhadap model nol. NFI berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, nilai NFI adalah 0,92, menunjukkan kecocokan yang baik dengan data (Hair et al., 2019). Indeks kesesuaian model (*goodness-of-fit index/GoF*) memberikan penilaian keseluruhan dari kecocokan model dengan menggabungkan informasi dari beberapa indeks kecocokan. GoF berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, nilai GoF adalah 0,89, yang mengindikasikan kecocokan yang memuaskan dengan data (Hair et al., 2019).

4.2 Pembahasan

Temuan-temuan dari penelitian ini menjelaskan dinamika yang rumit antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Diskusi ini menyoroti implikasi utama dari hasil penelitian dan memberikan wawasan ke dalam konteks sosial-ekonomi yang lebih luas di Indonesia.

a. Kebijakan Pendidikan dan Ketimpangan Ekonomi

Hubungan negatif yang signifikan antara persepsi kebijakan pendidikan dan ketimpangan ekonomi menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam membentuk hasil sosial-ekonomi. Kebijakan pendidikan yang efektif memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di pasar tenaga kerja Indonesia. Namun, tantangan seperti kesenjangan pendidikan antarwilayah masih ada, sehingga menghambat pembangunan yang inklusif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, intervensi yang tepat sasaran sangat penting, termasuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat. Penelitian menyoroti pentingnya mengurangi ketidaksetaraan pendidikan, angka putus sekolah, dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (Wardhana et al., 2023). Selain itu, akses terhadap pendidikan, air bersih, dan sanitasi sangat penting dalam mengurangi kesenjangan kemiskinan (Budiono & Purba, 2022). Transfer fiskal antar pemerintah dapat berdampak positif terhadap kesetaraan pendidikan, dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan (Wirandana & Khoirunurrofik, 2022). Desentralisasi dalam pembuatan kebijakan pendidikan mencerminkan preferensi masyarakat, tetapi mungkin memerlukan optimalisasi untuk meningkatkan hasil pembelajaran (Bano & Dyonisius, 2023). Kesetaraan gender dan anggaran pendidikan diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mengurangi kesenjangan pendidikan (Setyadi, 2022).

b. Distribusi Pendapatan dan Ketimpangan Ekonomi

Demikian pula, hubungan negatif antara persepsi distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi menyoroti pentingnya pemerataan sumber daya dan peluang dalam mendorong pertumbuhan inklusif. Perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia (M. Putri & Iryani, 2023). Namun, tantangan seperti lapangan kerja informal dan sistem perlindungan sosial yang tidak memadai masih ada, sehingga memperparah kesenjangan ekonomi (Haliim & Purba, 2023). Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, reformasi kebijakan yang komprehensif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Mengatasi pekerjaan informal melalui upaya formalisasi dan memperkuat sistem perlindungan sosial dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan (Wardhana et al., 2023). Selain itu, berinvestasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan pembangunan sektor pertanian dapat berkontribusi lebih jauh pada distribusi pendapatan yang lebih adil (Rakhmani & Sakhyya, 2024). Mengakui dan mengatasi ketimpangan sosial dalam struktur akademik dan ketenagakerjaan juga penting untuk mendorong masyarakat dan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia (Muttaqin et al., 2023).

c. Hubungan antara Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan

Analisis mediasi menunjukkan bahwa persepsi kebijakan pendidikan secara parsial memediasi hubungan antara persepsi distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai mekanisme yang melaluinya persepsi distribusi pendapatan memengaruhi hasil ekonomi. Kebijakan pendidikan yang efektif dapat membantu mengatasi akar permasalahan ketimpangan ekonomi dengan mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Namun, untuk mencapai hasil pendidikan yang setara diperlukan upaya yang terkoordinasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang efektif memainkan peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dengan mempromosikan akses yang sama terhadap pendidikan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (Rahman, 2024). Di negara-negara seperti Nigeria dan Filipina, implementasi kebijakan pendidikan sangat penting untuk pembangunan sosial-ekonomi dan politik, karena eksekusi yang buruk dapat menghambat kemajuan dan memperburuk ketidaksetaraan (Aji et al., 2022; Leila & Kimpo, 2022; Xi, 2023). Amerika Serikat juga menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan pendapatan, dan menekankan perlunya saran kebijakan untuk mengurangi masalah ini melalui analisis historis dan aplikasi modern (Adesua, 2022). Upaya terkoordinasi lintas sektor seperti pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial sangat penting di Indonesia untuk mencapai hasil pendidikan yang setara dan memerangi kesenjangan ekonomi secara efektif. Dengan memastikan implementasi yang tepat, memprioritaskan akses yang sama untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang, dan berinvestasi pada guru yang berkualitas, Indonesia dapat bekerja untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif.

4.3 Implikasi Kebijakan

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang berupaya mendorong pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan hasil ekonomi di Indonesia. Intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong pemerataan pendapatan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan yang

berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, mengatasi hambatan struktural dan mendorong mobilitas sosial sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk memenuhi potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara.

4.4 Arah Penelitian di Masa Depan

Meskipun studi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia, ada beberapa arah penelitian yang perlu dieksplorasi di masa depan. Studi longitudinal yang melacak perubahan dalam kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan ketimpangan ekonomi dari waktu ke waktu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme kausal yang mendasari hubungan ini. Selain itu, metode penelitian kualitatif, seperti wawancara dan kelompok diskusi terarah, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengalaman hidup individu yang terdampak oleh kesenjangan sosial-ekonomi.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai dinamika yang rumit antara kebijakan pendidikan, distribusi pendapatan, dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Temuan-temuan ini menyoroti peran penting pendidikan dalam membentuk hasil sosial-ekonomi dan pentingnya distribusi pendapatan yang adil dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kebijakan pendidikan yang efektif dan intervensi yang ditargetkan untuk mendorong distribusi pendapatan yang adil sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dalam hasil ekonomi dan mendorong kohesi sosial. Dengan mengatasi akar penyebab ketimpangan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh warganya. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang ekonomi pembangunan dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang ingin mendorong pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesua, V. O. (2022). Implementation of educational policy for socio-economic and political emancipation in Nigeria. *British Journal of Education*, 10(10), 51–59. <https://doi.org/10.37745/bje.2013/vol10n105159>
- Ahmed, Z., Khan, S., Saeed, S., & Haider, S. I. (2021). An Overview of Educational Policies of Pakistan (1947–2020). *Psychology and Education*, 58(1), 4459–4463.
- Aji, R. H. S., Syaokani, M. N. M., Panjaitan, M., & Rezki, A. (2022). Legal Policy on the National Education System In Influencing Worker Productivity in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 10(2), 355–368. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27802>
- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628–636. <http://dx.doi.org/10.20527/jiep.v5i2.6408>
- Bano, M., & Dyonisius, D. (2023). *Community-responsive education policies and the question of optimality: Decentralisation and district-level variation in policy adoption and implementation in Indonesia*.
- Budiono, S., & Purba, J. T. (2022). Reducing poverty strategy through educational participation, clean water, and sanitation in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 177–198. <http://dx.doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4158>
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 105–129. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>
- Handayani, B. D., Yanto, H., Pujiati, A., Ridzuan, A. R., Keshminder, J. S., & Shaari, M. S. (2022). The implication of energy consumption, corruption, and foreign investment for sustainability of income distribution in Indonesia. *Sustainability*, 14(23), 15915. <http://dx.doi.org/10.3390/su142315915>

- Hasan, Z. (2021). Indonesian economic diversification as an emerging markets country to drive economic growth. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 17(3), 549–564.
- Hill, H. (2018). Asia's third giant: A survey of the Indonesian economy. *Economic Record*, 94(307), 469–499.
- Hubbansyah, A. K., Hakim, D. B., & Hartoyo, S. (2023). Three Decades of Structural Transformation of the Indonesian Economy: Has the Turning Point Been Reached? *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 5(2), 145–155.
- Hutagaol, A. L., Syukri, M., Siahaan, A., & Wardah, S. R. R. (2022). An Analysis of National Education System Policy and Social Values. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6497–6504.
- Kumari, S. (2023). Inequalities based on social categories, culture, race, religion and ethnicity. *IJPS*, 5(1), 5–8.
- Leila, G., & Kimpo, J. N. (2022). The Relationship between Education Policy and Socioeconomic Inequality. *Journal of Education Review Provision*, 2(3), 83–90.
- Ma, S. (2023). A Study of Inequality of Opportunity in Income Distribution. *Journal of Economics, Trade and Marketing Management*, 5(1), p64. <https://doi.org/10.22158/jetmm.v5n1p64>
- Makhlouf, Y., & Lalley, C. (2023). Education Expansion, Income Inequality and Structural Transformation: Evidence From OECD Countries. *Social Indicators Research*, 169(1), 255–281.
- Mustafa, A. N. (2023). Reflection on the Latest Pisa Results of Indonesia. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 11(5), 1223–1228.
- Muttaqin, T. F., Masbar, R., & Jamal, A. (2023). Poverty in Indonesia: An Application of Error Correction Model (ECM) Approach. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(1), 73–83.
- Novia, T. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pekerja Berpendidikan Sma Ke Atas, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 1–12.
- Pape, U. J., & Ali, R. (2023). *Indonesia Poverty Assessment-Pathways towards Economic Security*.
- Putri, M., & Iryani, N. (2023). Factors Affecting Income Distribution Inequality. *Gorontalo Development Review*, 98–109.
- Putri, M. R., Nugraha, G. S., & Dwiyanaputra, R. (2023). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Pendidikan Menggunakan Metode K-Means Clustering. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering (J-Cosine)*, 7(1), 76–83.
- Rabasa, A., & Chalk, P. (2001). *Indonesia's transformation and the stability of Southeast Asia*. Rand Corporation.
- Rahman, M. (2024). The Role of Education in Reducing Poverty and Social Inequality. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13. <https://doi.org/10.21275/SR24329223914>
- Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2024). Inequalities and social sciences in neoliberal Indonesia. *International Social Science Journal*, 74(251), 9–23.
- Rosmanidar, E., & Mutia, A. (2023). Economic Development and Equity Policy in Islamic Economic Perspective. *ICIFEB 2022: Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia*, 214.
- Sakamoto, T. (2023). Poverty, inequality, and redistribution: An analysis of the equalizing effects of social investment policy. *International Journal of Comparative Sociology*, 00207152231185282.
- Setyadi, S. (2022). Inequality of Education in Indonesia by Gender, Socioeconomic Background and Government Expenditure. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17(1).
- Teasley, M. L. (2022). Education policy and outcomes within the African American population. In *Race and Social Policy* (pp. 61–74). Routledge.
- Triansyah, F. A., Gunawan, A., & Ramadhaniyati, R. (2023). Factors of Indonesia Economic Growth (2017-2022). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 11(01), 51–65.
- Wagle, U. R. (2023). Concepts and measurements of economic inequality. In *Research Handbook on Poverty and Inequality* (pp. 68–87). Edward Elgar Publishing.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Fauzy, M. Z. (2023). Determinan Ketimpangan Pendidikan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 21(1), 101–111.
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Educational inequality in Indonesia: are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? *Educational Studies*, 1–20.
- Xi, J. (2023). Education Inequality: Root Cause and Policy Suggestions. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 7, 102–105.